



Kampung Ramah Anak Butuh Pendampingan

UMBULHARJO, BERNAS

– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menyatakan saat ini Kota Yogyakarta sudah memiliki 185 kampung ramah anak yang biasanya berbasis rukun warga. Namun, lanjut Octo, masih banyak kampung membutuhkan pendampingan agar bisa mandiri.

“Kemandirian kampung ramah anak sangat diperlukan, apalagi tahun ini sudah tidak ada lagi hibah yang diberikan,” katanya, Minggu (5/2).

Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam upaya menjamin kota pendidikan tersebut agar juga sebagai kota layak anak dengan komitmen memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak anak.

“Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016. Komisi Perlindungan

an Anak Indonesia (KPAI) Kota Yogyakarta sudah terbentuk dan siap bekerja,” kata dia.

KPAI Kota Yogyakarta diketuai oleh akademisi sekaligus praktisi pendidikan Sutikno, dibantu empat anggota lain yang berasal dari berbagai latar belakang seperti praktisi pendidikan anak usia dini, tokoh masyarakat, hingga pegiat organisasi sosial penyandang disabilitas. Sekretariat KPAI Kota Yogyakarta berada di Jalan Batikan.

Warga dapat memanfaatkan keberadaan KPAI Kota Yogyakarta tersebut untuk menyampaikan berbagai aduan terkait pelanggaran hak anak asalkan disertai dengan bukti kuat.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak dan kampung ramah anak. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005